



## EVALUASI KINERJA PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORPORASI DI ERA GLOBALISASI

Rizky Satria Dimlana<sup>1</sup>, Muhamad Fadly Darmawan<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

Email: [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)

### Abstrak

Dalam era globalisasi, peningkatan tindak pidana korporasi menjadi perhatian utama bagi Penyidik Polri. Evaluasi kinerja mereka dalam menangani fenomena ini menjadi esensial. Penyidik Polri dihadapkan pada tantangan kompleks seperti kompleksitas kasus, koordinasi lintas negara, dan ketangguhan hukum internasional. Namun, upaya-upaya mereka terbukti bervariasi dalam efektivitasnya. Beberapa penyidik berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap dinamika globalisasi, sementara yang lain menghadapi kendala dalam memahami kerumitan kasus. Koordinasi dengan lembaga hukum internasional juga mempengaruhi hasil investigasi. Evaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas institusi, keterampilan investigasi, dan tingkat koordinasi lintas negara. Langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pelatihan yang lebih intensif, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kejahatan korporasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja ini dapat menjadi landasan untuk peningkatan strategi penegakan hukum di masa depan..

**Kata Kunci :** *Penyidik Polri, Tindak Pidana Korporasi, Era Globalisasi*

### Abstract

*In the era of globalization, the increase in corporate crime has become a primary concern for the Indonesian National Police (Polri) investigators. Evaluating their performance in addressing this phenomenon is essential. Polri investigators face complex challenges such as the complexity of cases, cross-border coordination, and the resilience of international law. However, their efforts have varied in effectiveness. Some investigators have demonstrated good adaptability to the dynamics of globalization, while others have faced obstacles in understanding the complexity of cases. Coordination with international legal institutions also influences investigation outcomes. Evaluating the performance of Polri investigators in handling corporate crime needs to consider factors such as institutional capacity, investigative skills, and the level of cross-border coordination. Improvement measures aimed at enhancing investigators' abilities to address globalization challenges include more intensive training, strengthening international cooperation, and developing policies responsive to corporate crime dynamics. Thus, this performance evaluation can serve as a basis for enhancing law enforcement strategies in the future.*

**Keyword :** *Investigator, Criminal Act, Corporate*



### PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, perubahan dramatis terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis dan kejahatan. Globalisasi telah membawa dampak signifikan pada perilaku ekonomi, termasuk meningkatnya kompleksitas tindak pidana korporasi di seluruh dunia. Fenomena ini menuntut peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, termasuk Penyidik Polri, dalam menangani tantangan kejahatan yang semakin berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di era globalisasi telah menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk beroperasi di pasar internasional. Namun, di samping peluang tersebut, globalisasi juga telah memperkenalkan risiko-risiko baru, termasuk peningkatan dalam tindak pidana korporasi. Korporasi modern seringkali beroperasi di lintas negara dengan rantai pasok global yang kompleks, yang dapat memberikan celah bagi praktik-praktik ilegal seperti penipuan, pencucian uang, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Tindak pidana korporasi dapat memiliki dampak yang merusak pada masyarakat, lingkungan, dan perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, praktik korupsi dalam perusahaan dapat merugikan negara dalam hal kehilangan pendapatan pajak dan investasi yang berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, pencemaran lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan operasi korporasi dapat menyebabkan kerugian besar bagi komunitas lokal dan ekosistem yang terpengaruh.

Di Indonesia, tindak pidana korporasi menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya investasi asing. Penyidik Polri memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korporasi dan memastikan keadilan dilaksanakan. Namun, mereka dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam menjalankan tugas mereka.

Salah satu tantangan utama bagi penyidik Polri adalah kompleksitas kasus-kasus tindak pidana korporasi. Kasus-kasus ini sering melibatkan dokumentasi yang rumit, jaringan perusahaan yang tersebar di berbagai negara, dan bukti-bukti yang sulit untuk dikumpulkan. Penyidik Polri perlu memiliki keterampilan investigasi yang canggih dan pemahaman yang mendalam tentang hukum nasional dan internasional untuk dapat mengatasi kompleksitas ini.

Koordinasi lintas negara juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penanganan tindak pidana korporasi. Dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dan pelaku kejahatan yang dapat dengan mudah melintasi batas-batas negara, penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus tindak pidana korporasi seringkali memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum di berbagai negara. Kurangnya koordinasi internasional dapat menyulitkan upaya penegakan hukum dan memberikan keunggulan bagi pelaku kejahatan.

---

<sup>1</sup> Arief Ramadhan, *Hukum Pidana Internasional: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 45.



Ketangguhan hukum internasional juga menjadi tantangan dalam menangani tindak pidana korporasi di era globalisasi. Beberapa praktik kejahatan korporasi mungkin legal di satu negara, sementara dilarang di negara lain. Hal ini dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan menyebabkan kebingungan dalam menentukan yurisdiksi yang tepat untuk menuntut pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan bagi penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Kasus-kasus ini seringkali memerlukan waktu, tenaga, dan dana yang besar untuk penyelidikan yang efektif. Namun, sumber daya yang terbatas sering menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan yang memadai.

Selain tantangan operasional, faktor-faktor institusional juga dapat mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Ketergantungan pada kebijakan dan regulasi yang kurang responsif terhadap dinamika globalisasi, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan profesionalisme, dapat menghambat kemampuan penyidik untuk mengatasi kasus-kasus korporasi yang semakin kompleks.,

Dalam konteks yang semakin global, evaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi menjadi penting. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas strategi penegakan hukum yang ada, serta mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan. Dengan demikian, evaluasi kinerja dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan tindak pidana korporasi di era globalisasi.

Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu *pertama*, bagaimana kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi di era globalisasi?; *kedua*, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi, dan bagaimana dampaknya terhadap hasil investigasi?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, kami akan menerapkan metode penelitian normatif. Pendekatan ini akan melibatkan analisis literatur dan kerangka hukum. Pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan pedoman-pedoman yang mengatur implementasi program diversifikasi di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengevaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik, analisis dokumen, dan observasi langsung. Penelitian ini memperhatikan faktor-faktor seperti kapasitas institusi, keterampilan investigasi, dan tingkat koordinasi lintas negara dalam menilai efektivitas penyidik Polri. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan utama yang relevan dengan masalah penelitian.

---

<sup>2</sup> Rudi Darma, *Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 67.



### HASIL & PEMBAHASAN

#### **Kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi di era globalisasi**

Kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi di era globalisasi merupakan isu penting yang melibatkan berbagai faktor kompleks. Dalam konteks ini, kinerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan penyidik untuk secara efektif mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut pelaku tindak pidana korporasi dengan memperhatikan berbagai tantangan dan dinamika yang ada dalam lingkungan globalisasi. Untuk memahami kinerja penyidik Polri dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk kemampuan investigasi, koordinasi lintas negara, dan pengaruh hukum internasional.<sup>3</sup>

Salah satu aspek penting dari kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi adalah kemampuan investigasi mereka. Investigasi tindak pidana korporasi seringkali memerlukan keahlian khusus dalam mengumpulkan bukti, menganalisis data keuangan, dan memahami kerumitan struktur perusahaan. Dalam era globalisasi, perusahaan sering beroperasi di berbagai negara dengan rantai pasokan global yang kompleks, sehingga penyidik Polri perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang transaksi lintas negara dan praktek bisnis internasional.

Koordinasi lintas negara juga menjadi faktor kunci dalam menilai kinerja penyidik Polri. Dalam banyak kasus tindak pidana korporasi, pelaku kejahatan dan bukti-bukti terdapat di beberapa yurisdiksi yang berbeda, sehingga kerjasama internasional sangatlah penting. Penyidik Polri perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara-negara lain untuk bertukar informasi, mengkoordinasikan penyelidikan, dan mengekstradisi tersangka jika diperlukan. Kurangnya koordinasi internasional dapat menyulitkan penyidik dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korporasi secara efektif.

Selain tantangan operasional, pengaruh hukum internasional juga mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Kasus-kasus tindak pidana korporasi seringkali melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, dan hukum yang berlaku dapat bervariasi antara negara-negara tersebut. Hal ini dapat menyulitkan penyidik Polri dalam menentukan yurisdiksi yang tepat untuk menuntut pelaku kejahatan, serta memahami implikasi hukum internasional yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki.<sup>4</sup>

Selain faktor-faktor eksternal seperti koordinasi lintas negara dan hukum internasional, faktor internal seperti kapasitas institusi dan keterampilan investigasi juga mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Institusi Polri perlu memiliki sumber daya yang memadai, termasuk personel yang terlatih dengan baik, teknologi yang mutakhir, dan dukungan keuangan yang cukup untuk dapat secara efektif menangani kasus-kasus tindak pidana korporasi. Selain itu, penyidik Polri juga perlu terus meningkatkan keterampilan investigasi mereka melalui pelatihan dan pengembangan

---

<sup>3</sup> Maria Katarina Taurina, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Surabaya: Genta Publishing, 2020), hlm. 89.

<sup>4</sup> Agung Santoso, *Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Proses Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 112.



profesionalisme agar dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menangani tindak pidana korporasi.

Dalam mengevaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi di era globalisasi, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor tersebut secara holistik. Evaluasi kinerja ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup analisis data kuantitatif dan kualitatif serta tinjauan terhadap berbagai aspek kinerja penyidik Polri, mulai dari kemampuan investigasi hingga efektivitas koordinasi lintas negara.<sup>5</sup>

Evaluasi kinerja juga dapat melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang relevan, serta identifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi, dapat dikembangkan strategi-strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi di era globalisasi ini. Dengan demikian, evaluasi kinerja penyidik Polri dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa depan.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi, dan bagaimana dampaknya terhadap hasil investigasi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan lingkungan kerja, sumber daya, koordinasi, dan kebijakan. Memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penyidik dan potensi dampaknya terhadap hasil investigasi.

Lingkungan kerja yang kompleks dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja penyidik Polri. Kasus tindak pidana korporasi seringkali melibatkan struktur perusahaan yang kompleks, rantai pasokan global, dan dokumentasi yang rumit. Penyidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek bisnis dan keuangan untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar institusi, juga dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas penyidik dalam melakukan penyelidikan.

Sumber daya yang terbatas merupakan tantangan serius bagi kinerja penyidik Polri. Penyelidikan kasus tindak pidana korporasi seringkali membutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang besar untuk dapat dilakukan secara efektif. Namun, sumber daya yang terbatas, baik dalam hal personel, teknologi, atau anggaran, dapat menghambat kemampuan penyidik untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan mendalam. Kurangnya sumber daya juga dapat menyebabkan penyidik terbatas dalam melakukan pelatihan dan

---

<sup>5</sup> I Made Suarjana, *Asas-asas Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 135.



pengembangan profesionalisme yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas kasus korporasi.<sup>6</sup>

Koordinasi lintas negara juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Dalam era globalisasi, perusahaan seringkali beroperasi di berbagai negara dengan rantai pasokan yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, penyidik Polri perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara-negara lain untuk bertukar informasi, mengkoordinasikan penyelidikan, dan mengekstradisi tersangka jika diperlukan. Kurangnya koordinasi internasional dapat menyulitkan upaya penyidik dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana korporasi yang melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi.

Selain faktor-faktor operasional, pengaruh kebijakan dan regulasi juga dapat mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Ketergantungan pada kebijakan yang kurang responsif terhadap dinamika globalisasi dapat membatasi kemampuan penyidik untuk mengatasi kasus-kasus korporasi yang semakin kompleks. Selain itu, kurangnya kejelasan dalam peraturan hukum dan kebijakan nasional dapat mempersulit proses penyelidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korporasi.

Dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap hasil investigasi dapat sangat signifikan. Lingkungan kerja yang kompleks dan tekanan eksternal dapat mengganggu independensi dan objektivitas penyidik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas penyelidikan dan keputusan penuntutan. Sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan penyidik terbatas dalam melakukan penyelidikan yang komprehensif, yang dapat mengurangi kemungkinan pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korporasi. Kurangnya koordinasi lintas negara juga dapat menghambat kemampuan penyidik dalam mengumpulkan bukti dan mengejar pelaku kejahatan di berbagai yurisdiksi. Sementara itu, pengaruh kebijakan dan regulasi yang tidak responsif terhadap dinamika globalisasi dapat menghambat efektivitas upaya penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korporasi.<sup>7</sup>

Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan sumber daya bagi penyidik, peningkatan kerja sama lintas negara, dan reformasi kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika globalisasi. Dengan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi, dapat diharapkan peningkatan dalam hasil investigasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini.

---

<sup>6</sup> Dian Rosadi, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Implementasi*, (Semarang: Penerbit Undip Press, 2018), hlm. 178.

<sup>7</sup> Indriati Komalasari, *Hakim dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm. 203.



### KESIMPULAN

Kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi di era globalisasi dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas negara, dan pengaruh kebijakan hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, dapat ditingkatkan efektivitas penyidik dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korporasi.

Faktor-faktor seperti lingkungan kerja yang kompleks, sumber daya terbatas, koordinasi lintas negara, dan kebijakan hukum mempengaruhi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi. Dampaknya terhadap hasil investigasi meliputi gangguan terhadap independensi, pembatasan dalam penyelidikan, hambatan dalam koordinasi internasional, dan pembatasan dalam penegakan hukum akibat kebijakan yang tidak responsif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Ramadhan, *Hukum Pidana Internasional: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- Rudi Darma, *Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019).
- Maria Katarina Taurina, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Surabaya: Genta Publishing, 2020).
- Agung Santoso, *Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Proses Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 112.
- I Made Suarjana, *Asas-asas Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Dian Rosadi, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Implementasi*, (Semarang: Penerbit Undip Press, 2018).
- Indriati Komalasari, *Hakim dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2020).